

**“TRANSFORMASI PERBANKAN: PERAN BANK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP STABILITAS KEUANGAN”**

**Mohammad Ilham Munfarid,<sup>1</sup> Muhamad Nur Khasani,<sup>2</sup> Hikmal Aldi Prasetyo,<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN K.H Abdurraman Wahid Pekalongan

<sup>1</sup>[Munf678@gmail.com](mailto:Munf678@gmail.com),

Received: 15 – 3 – 2026

Revised: 15 – 4 – 2026

Approved: 15 – 5 – 2026

\*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

**Abstract**

*The transformation of banking supervision in Indonesia has become an important issue in maintaining financial system stability amid economic developments and the digitalization of the financial sector. This study aims to evaluate changes in the role of Bank Indonesia before and after the establishment of the Financial Services Authority (OJK) and their impact on financial stability. The method used is a descriptive qualitative approach based on secondary data from literature and regulations. The findings show that before OJK, integrated supervision facilitated policy coordination and crisis response but remained weak in microprudential aspects. After OJK was established, microprudential supervision became stronger through a risk-based approach, although coordination challenges between institutions emerged. In conclusion, the effectiveness of supervision depends not only on institutional structure but also on policy synergy between Bank Indonesia and OJK.*

**Keywords:** *Banking Supervision, Dual Authority, Financial Stability, Policy Coordination.*

**Abstrak**

Transformasi pengawasan perbankan di Indonesia menjadi isu penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah perkembangan ekonomi dan digitalisasi sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perubahan peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari literatur dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum OJK, pengawasan terintegrasi memudahkan koordinasi kebijakan dan respons krisis, namun masih lemah pada aspek mikroprudensial. Setelah OJK terbentuk, pengawasan mikroprudensial menjadi lebih kuat melalui pendekatan berbasis risiko, meskipun menimbulkan tantangan koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK.

**Kata Kunci:** Pengawasan Perbankan, Dual Authority, Stabilitas Keuangan, Koordinasi Kebijakan.

---

## Pendahuluan

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fungsi intermediasi yang dijalankan perbankan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana, tetapi juga mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam konteks tersebut, keberadaan sistem pengawasan yang kuat menjadi prasyarat utama agar aktivitas perbankan tetap berada dalam koridor kehati-hatian serta mampu mengantisipasi potensi risiko yang bersifat sistemik. Kelemahan dalam pengawasan dapat berdampak luas, tidak hanya pada kinerja bank secara individual, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Fahrudin et al., 2025).

Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan perbankan sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang mengatur hubungan antara otoritas pengawas dan bank sentral. Sebelum reformasi kelembagaan, fungsi pengawasan perbankan di Indonesia berada di bawah Bank Indonesia yang juga menjalankan kebijakan moneter. Model ini mencerminkan pendekatan terintegrasi yang memudahkan koordinasi kebijakan, terutama dalam merespons tekanan ekonomi dan menjaga stabilitas likuiditas. Namun demikian, penggabungan fungsi tersebut juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait kompleksitas tugas dan potensi konflik kepentingan antara tujuan stabilitas makroekonomi dan pengawasan mikroprudensial (Pratiwi et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan melalui pemisahan fungsi dan peningkatan fokus kelembagaan. Pendekatan pengawasan berbasis risiko yang diterapkan OJK dinilai mampu meningkatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta mendorong kepatuhan perbankan terhadap regulasi. Selain itu, model dual authority yang membagi peran antara Bank Indonesia dan OJK memberikan kejelasan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Rozikin, 2025).

Meskipun demikian, literatur yang ada juga menyoroti keterbatasan dalam implementasi model tersebut, terutama terkait koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal. Kurangnya sinkronisasi kebijakan berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan, terlebih di tengah perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks akibat inovasi digital seperti fintech dan digital banking. Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi serta sinergi antara otoritas yang terlibat (Hasan et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transformasi pengawasan perbankan melalui analisis peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan serta implikasinya terhadap stabilitas keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai reformasi sektor

---

keuangan, sekaligus menawarkan perspektif yang lebih komprehensif terkait efektivitas model *dual authority* dalam menghadapi dinamika sistem keuangan yang terus berkembang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk mengkaji transformasi pengawasan perbankan di Indonesia, khususnya perubahan peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Subjek penelitian berupa kebijakan, regulasi, dan praktik pengawasan perbankan yang dianalisis melalui data sekunder. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan jurnal ilmiah terbaru, laporan resmi, dan peraturan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pembentukan OJK serta menilai implikasinya terhadap stabilitas keuangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Transformasi Pengawasan Perbankan: Temuan Utama dan Perbandingan Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan**

Transformasi pengawasan perbankan di Indonesia menunjukkan perubahan mendasar dari model terintegrasi menuju model *dual authority* yang memisahkan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pembentukan OJK, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia memiliki keunggulan dalam koordinasi kebijakan karena seluruh fungsi berada dalam satu otoritas. Hal ini memungkinkan respons yang relatif cepat terhadap tekanan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan. Namun, konsentrasi kewenangan tersebut juga menimbulkan keterbatasan, terutama karena fokus Bank Indonesia terbagi antara menjaga stabilitas makroekonomi dan memastikan kesehatan individual bank (Pratiwi et al., 2025).

Setelah pembentukan OJK, terjadi pergeseran pendekatan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis spesialisasi. OJK mengambil alih fungsi pengawasan mikroprudensial dengan pendekatan berbasis risiko yang memungkinkan identifikasi potensi permasalahan secara lebih dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model tersebut meningkatkan kualitas pengawasan pada tingkat institusi perbankan, khususnya dalam aspek kepatuhan dan manajemen risiko. Di sisi lain, pemisahan kewenangan juga

memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK, yang dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi kecepatan respons terhadap dinamika sistem keuangan (Rozikin, 2025).

Perbandingan antara kedua periode tersebut menunjukkan adanya *trade-off* antara efisiensi koordinasi dan kedalaman pengawasan. Model terintegrasi yang dijalankan oleh Bank Indonesia lebih unggul dalam hal kecepatan pengambilan keputusan dan respons krisis, tetapi kurang optimal dalam pengawasan yang mendalam terhadap masing-masing bank. Sebaliknya, model *dual authority* memberikan pengawasan yang lebih fokus dan komprehensif pada tingkat mikro, namun memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih kompleks untuk menjaga konsistensi kebijakan secara makro. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa pemisahan fungsi pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan jika tidak didukung koordinasi yang kuat (Hasan et al., 2025).

**Tabel 1. Pengawasan Perbankan**

Nomor	Aspek	Sebelum OJK (Bank Indonesia)	Sesudah OJK (Dual Authority BI-OJK)
1.	Model Pengawasan	Terintegrasi	Terpisah (Makro & Mikro)
2.	Otoritas Utama	Bank Indonesia	BI (makroprudensial) & OJK (mikroprudensial)
3.	Fokus Pengawasan	Stabilitas makro & mikro	Spesialisasi fungsi
4.	Keunggulan	Koordinasi cepat, respons krisis	Pengawasan lebih fokus dan mendalam
5.	Kelemahan	Potensi konflik kepentingan	Koordinasi antar lembaga lebih kompleks
6.	Pendekatan Pengawasan	Umum dan terpusat	Berbasis risiko ( <i>risk-based supervision</i> )
7.	Efektivitas	Tinggi dalam jangka pendek	Lebih kuat dalam pengawasan jangka panjang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi pengawasan perbankan di Indonesia tidak hanya merupakan perubahan struktural, tetapi juga

---

mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan pengawasan. Peralihan dari model terintegrasi ke model *dual authority* menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui spesialisasi fungsi. Namun, efektivitas model ini sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan reformasi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola sinergi kebijakan secara berkelanjutan (Fahrudin et al., 2025).

### **Implikasi Transformasi terhadap Stabilitas Keuangan dan Interpretasi Temuan**

Transformasi pengawasan perbankan dari model terintegrasi menuju *dual authority* menghadirkan perubahan mendasar dalam cara stabilitas sistem keuangan dijaga di Indonesia. Pemisahan fungsi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menciptakan pembagian peran yang lebih spesifik, di mana Bank Indonesia berfokus pada stabilitas makro melalui kebijakan makroprudensial, sementara OJK menitikberatkan pada pengawasan mikroprudensial di tingkat institusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan kepatuhan perbankan. Pola ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari pengawasan yang bersifat umum menuju pengawasan yang lebih terarah dan sistematis, sehingga risiko dapat diidentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas dalam sistem keuangan (Pratiwi et al., 2025).

Keterkaitan antara temuan penelitian dan tujuan awal menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak lagi bergantung pada satu otoritas tunggal, melainkan pada interaksi kebijakan yang saling melengkapi antara makroprudensial dan mikroprudensial. Dalam kerangka ini, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi antar lembaga dalam merespons dinamika ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pengawasan mikro mengalami peningkatan, efektivitas sistem secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh sejauh mana sinergi kebijakan dapat dijalankan secara konsisten. Situasi ini menegaskan bahwa kompleksitas sistem keuangan modern menuntut pendekatan yang tidak hanya terfokus pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada integrasi kebijakan yang berkelanjutan (Fahrudin et al., 2025).

Dari sudut pandang interpretatif, pergeseran dari model terintegrasi ke model *dual authority* menunjukkan perubahan sumber utama stabilitas keuangan. Pada periode sebelumnya, stabilitas lebih ditopang oleh kecepatan respons kebijakan yang terpusat, meskipun memiliki keterbatasan dalam mendeteksi risiko secara mendalam pada tingkat

---

individual bank. Dalam konfigurasi baru, stabilitas lebih banyak ditentukan oleh kualitas pengawasan mikro yang komprehensif, yang memungkinkan pengendalian risiko dilakukan secara lebih sistematis (Samudra dkk., 2026). Walaupun demikian, dinamika koordinasi antar lembaga masih menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menyelaraskan kebijakan secara adaptif di tengah perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks (Hasan et al., 2025; Rozikin, 2025).

### **Kesesuaian, Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu, serta Tantangan Pengawasan Perbankan**

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi pengawasan perbankan di Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan temuan dalam studi sebelumnya, khususnya terkait penguatan fungsi pengawasan mikro setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pendekatan berbasis risiko yang diterapkan OJK mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong kepatuhan perbankan terhadap regulasi. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut, terutama dalam hal peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap potensi risiko dan penguatan praktik manajemen risiko di tingkat institusi (Rozikin, 2025).

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan nuansa yang tidak sepenuhnya tercermin dalam kajian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu cenderung menempatkan pemisahan fungsi pengawasan sebagai solusi yang secara langsung meningkatkan efektivitas sistem keuangan (Samudra dkk., 2022). Kajian ini justru mengindikasikan bahwa efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga. Pemisahan kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK membuka ruang terjadinya fragmentasi kebijakan ketika mekanisme koordinasi belum berjalan optimal. Perspektif ini memberikan penekanan baru bahwa desain kelembagaan tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada praktik implementasi yang menyertainya (Hasan et al., 2025).

Fokus lain yang mengemuka dalam penelitian ini berkaitan dengan tantangan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Perbedaan orientasi antara kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan mikroprudensial oleh OJK berpotensi memunculkan ketidakselarasan dalam merespons dinamika sektor

---

keuangan. Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan berkembangnya inovasi keuangan digital seperti *digital banking* dan *financial technology*, yang menghadirkan pola risiko baru dan menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif (Fahrudin et al., 2025).

Kondisi tersebut mengarah pada kebutuhan akan penguatan sinergi antar otoritas sebagai prasyarat utama efektivitas sistem pengawasan. Keunggulan masing-masing lembaga tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diikuti dengan koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan (Samudra dkk., 2024). Upaya seperti penguatan forum koordinasi kebijakan, integrasi sistem informasi, serta penyelarasan regulasi menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pengawasan di tengah perubahan lanskap keuangan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi pengawasan perbankan di Indonesia masih berada dalam proses penyempurnaan. Penguatan pengawasan mikro telah memberikan kontribusi positif, tetapi efektivitas keseluruhan sistem masih dipengaruhi oleh kualitas hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Samudra dkk., 2025). Arah penguatan ke depan lebih relevan difokuskan pada peningkatan integrasi kebijakan dan konsistensi implementasi, sehingga sistem pengawasan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga mampu menjawab tantangan praktis dalam menjaga stabilitas keuangan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pengawasan perbankan di Indonesia dari model terintegrasi di bawah Bank Indonesia menuju model dual authority bersama Otoritas Jasa Keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam efektivitas pengawasan dan stabilitas keuangan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan OJK serta implikasinya terhadap stabilitas keuangan dapat terjawab melalui temuan bahwa model terintegrasi unggul dalam kecepatan koordinasi dan respons krisis, sementara model dual authority lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan mikroprudensial melalui pendekatan berbasis risiko. Namun demikian, keberhasilan model baru ini tidak hanya ditentukan oleh pemisahan fungsi, melainkan sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan sinergi kebijakan antara kedua otoritas. Dengan demikian, stabilitas keuangan dalam sistem saat ini lebih ditopang oleh keseimbangan antara kedalaman pengawasan mikro dan efektivitas koordinasi makro.

---

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih mendalami mekanisme koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan sektor keuangan digital yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas integrasi sistem informasi antar lembaga serta mengukur dampak empiris model dual authority terhadap ketahanan sistem keuangan dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi penguatan sistem pengawasan perbankan di Indonesia.

## Referensi

- Fahrudin, M., Mahardika, R., Sinaga, N. D. G., Siswajanthy, F., & Sjojfan, L. (2025). Analysis of OJK's Role in Banking Sector Supervision: Issues and Legal Solutions. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 12(7).
- Hasan, H., Berlianty, T., Djoanda, M., Titahelu, J. A. S., & Sahid, M. M. (2025). Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model. *Milrev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 619–644. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851>
- Mufidah, M., & Samudra, D. (2025). Analisis respons masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik Pemda Magelang di media sosial. *Journal Of Economics And Business*, 1(01), 37-45.
- Pratiwi, M., Abdullah, W., Sumarlin, S., & Annisanurfaidah, A. (2025). Optimalisasi Peran Regulasi Dual Otoritas (BI dan OJK) dalam Mendorong Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.59805>
- Rozikin, M. (2025). Analisis Kepatuhan Hukum Bank terhadap Regulasi OJK dan BI dalam Implementasi Layanan Digital Banking. *Journal of Islamic Finance and Sharia Banking*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v3i1.119>
- Samudra, D., Saputra, A. A., & Handayani, T. (2026). PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(01).
- Samudra, D., & Ismanto, K. (2025). AESTHETIC TRANSFORMATION OF PEKALONGAN BATIK: INTEGRATING TRADITIONAL ART INTO THE CREATIVE ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (jimbis)*, 4(1), 85-103.
- Samudra, D., Ikin, Z. W., & Ismanto, K. (2026). Analisis Dampak Ekonomi: Inovasi Alat Tanam Otomatis Kelompok Tani Kabupaten Pemalang. *Journal of Economics and Business*, 1(03), 10-15.
- Samudra, D., Mursid, M. C., & Muhtarom, A. (2025). The Influence Of Zakat Literacy, Religiosity, Service Quality, Trust And Perceived Ease Of Use On Digital Zakat Payment Intention In Pemalang Regency. *Al Tijarah*, 11(2), 305-315.
- Samudra, D., Aulia, F. (2025). Peran Kepemimpinan Transaksional Dalam Manajemen Talenta Era Digital Di Kabupaten Pekalongan. Vol.09 No.2 Desember 2025: 120-139

- 
- Samudra, D., & Mubin, A. F. (2025). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN STRATEGI SMART CITY DI KABUPATEN CILACAP 2021–2025. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 186-199.
- Samudra, D., & Hafisa, A. (2025). Model Pendekatan Peningkatan Wisata Kebudayaan Kabupaten Kebumen: Aspek Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi Menuju Tahun 2026: Bahasa Indonesia. *Jurnal Krisakti*, 2(2), 17-25.
- Samudra, Dio., Hafidzah, A. (2025). Strategi Pembangunan Pariwisata Berbasis Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Prespektif Pembangunan Daerah*. 2(2), 66-77.
- Samudra, D., & Rohayana, A. D. (2025). Kriteria Pemimpin Menurut Islam. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(01), 40-49.
- Samudra, D., Mufidah, M., & Jinnan, M. (2025). Digital Marketing Strategy of High Value Added Fishery Products from Central Java in Egyptian E-commerce. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 94-108.
- Samudra, D. (2025). Global Investment Trends In The Biotechnology and Nanotechnology Sector: Market Analysis and Opportunities. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 8-19.
- Samudra, D., Pratama, M. P. H., Fente, S. K., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Peningkatan Pembangunan Wisata Halal di Kabupaten Sleman: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 2025. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 39-49.
- Samudra, D., & Tamamudin, T. (2025). Sharia-Compliant Digital Marketing: Trends and Challenges in Indonesia's Financial Sector (2024-2025). *Neo Journal of economy and social humanities*, 4(3), 538-548.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Dampak teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) pada pemasaran digital di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., Mufidah, M., Muhtarom, A., & Mursid, M. C. (2025). Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pemberdayaan Komunitas. *Journal of Community Development, Engagement, and Services*, 1(1), 28-36.
- Samudra, D., & Mufidah, M. (2025). Inovasi Teknologi Pengembangan Wisata Cerdas (Smart Tourism): Studi Kasus Wisata Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Krisakti*, 2(1), 7-12.
- Samudra, D., Tamamudin, T., & Ayatullah, A. (2025). Innovation digital literacy public administration in Indonesia: National survey data. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 560-565.
- Samudra, D., & Hidayah, I. (2025). Economic Feasibility Analysis and Financing Model of Solar Power Plant Projects in Indonesia. *Alphabiz: Journal of Management and Digital Business*, 1(2), 52-57.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kepulauan Riau: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi: English. *Jurnal Archipelago*, 4(01), 42-54.
- Samudra, D. (2024). The Strategies for Improving the Quality of Basic Services as a Foundation for Local Economic Development in Subang Regency. *Scientific Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 30-34.
- Samudra, D., Safagutan, F., Silvi, N., Lutfiana, E., & Aura, H. (2024). A systematic review: Halal tourism development in Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 71-78.

- 
- Samudra, D., & Ridho, A. (2024). Manajemen Mutu Agroindustri Pengolahan Ikan Surabaya: Quality Management In Fish Processing Agro-Industries Surabaya. *Journal of Food Industrial Technology*, 1(3), 140-144.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2024). Pendidikan Ekonomi Islam: Mengintegrasikan Iman dan Keuangan. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Akbar, R. (2024). The Effect of Islamic Education on the Consumption Interest of Students Boarding School" Darussalam Gontor Ponorogo". *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 9-15.
- Samudra, D. (2024). ASEAN–China Free Trade: The Impact of ACFTA Policies on the Sustainability of Indonesian smes. *Journal of Principles Management and Business*, 3(01), 25-33.
- Samudra, D., Jannah, Z., Rahmah, H., Wirda, Z., & Rohmawati, S. (2024). Green Digital Marketing: Startegy For Environmentally Conscious smes. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7597-7606.
- Samudra, D., & Hadi, S. (2024). Efektivitas Program Beasiswa Islam Tenaga Kerja Ekonomi Islam Di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 8(01), 81-89.
- Samudra, D. (2022). Pengaruh Marketing Mix terhadap Minat Beli Konsumen Muslim pada Shopee: Studi Kasus Mahasiswa Darussalam Gontor Kampus Robithoh: The Effect of Marketing Mix on Muslim Consumer Purchase Intention at Shopee: Case Study of Darussalam Gontor Robithoh Campus Students. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 33-42.
- Samudra, D., & Mufidah, M. Contemporary Debates And Energy Policies In The Context Of International Political Economy. *Energy Politics: Global Patterns And Local Realities*, 1.
- Saputra, A. A., & Samudra, D. (2025). Peran Tradisi Kenduri dalam Membangun Modal Sosial (Aspek Bahasa Komunikasi) di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1(01), 1-7.